

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN 2015**



**BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Ridlo-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disajikan uraian tentang gambaran umum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Perencanaan Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2015, Disamping itu disampaikan pula laporan yang meliputi aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ini disampaikan, semoga dapat memberikan kontribusi positif pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Mojokerto pada umumnya.

Mojokerto, Januari 2016

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

HERYANA DODIK MURTONO, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19780727 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum SKPD

 1.2.2 Struktur Organisasi

 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama SKPD

Bab II. Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

 2.1.1 Visi dan Misi

 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran :

1. Penetapan Kinerja Tahun 2015

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

3. Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2015

DAFTAR TABEL

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mojokerto

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015

Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan agar terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dibentuklah Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberitaan, mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan, melakukan perekaman dan penyajian data, mengatur keprotokoleran kegiatan pimpinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan anggaran, maka Bagian Humas dan Protokol mempunyai kewajiban melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bentuk dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Gambaran Umum SKPD

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok :

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincin Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota dan Staf Ahli Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008, Bagian Humas dan Protokol mempunyai **Tugas** :

- 1) Melaksanakan pemberitaan;
- 2) Mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan;

- 3) Melakukan perekaman dan penyajian data;
- 4) Mengatur keprotokoleran kegiatan pimpinan ;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah KotaMojokerto sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Bagian Humas dan Protokol mempunyai **Fungsi** :

- 1) Pengumpulan bahan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan Pimpinan Pemerintah Kota Mojokerto;
- 2) Pelaksanaan perekaman, penyajian data dan dokumentasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto;
- 3) Pelaksanaan pemberitahuan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah Kota Mojokerto srt a mendistribusikan bahan-bahan penerbitan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan Pemerintah Kota yang membutuhkan pengaturan keprotokoleran;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja / Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

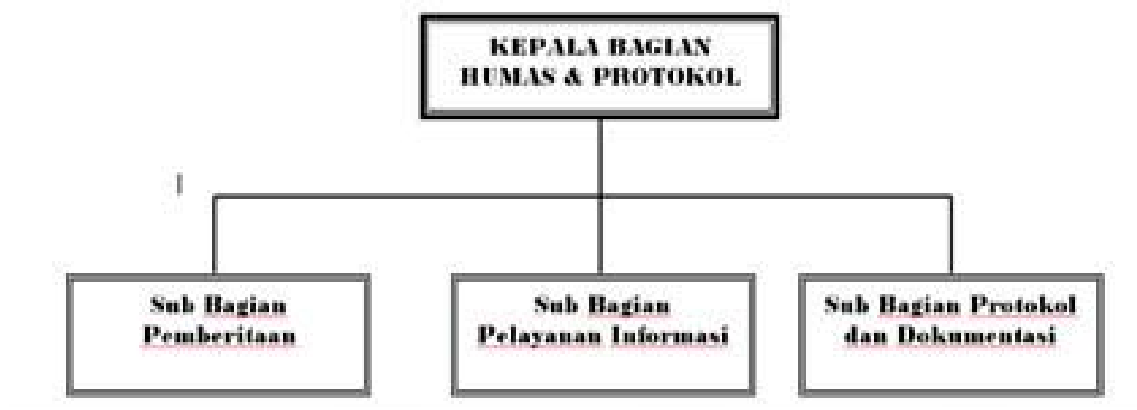
1.2.2. Struktur Organisasi

Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pemberitaan;
- b. Sub Bagian Pelayanan Informasi;
- c. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi.

Tabel 1.1

Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol



1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Sub Bagian Pemberitaan mempunyai Tugas :

1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pemberitaan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemberitaan;
3. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberitaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
4. Menyiapkan bahan-bahan petunjuk di bidang penerangan dan pemberitaan;
5. Menyiapkan pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah melalui media cetak maupun elektronik;
6. Menyiapkan bahan dalam memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap surat-surat pembaca di media massa atau surat-surat dari masyarakat;
7. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan penerbitan buletin karyawan sebagai media penerangan intern;
8. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembuatan film penerangan, pementasan sandiwara penerangan melalui media elektronik;
9. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembuatan folder; booklet, dan brosur serta menyelenggarakan papan pengumuman;
10. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan keterangan pers atau konferensi pers;
11. Menyiapkan rencana peliputan acara-acara kegiatan Pemerintah Daerah dengan mengundang pers;
12. Mempersiapkan pelaksanaan jumpa pers Pimpinan Pemerintah Daerah;

b. Sub Bagian Pelayanan Informasi mempunyai Tugas :

1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pelayanan informasi;
2. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pelayanan informasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan informasi;

4. Mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi dari masyarakat, organisasi non pemerintah dan perusahaan;
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kerja/ Instansi terkait, lembaga /organisasi kewartawanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Meberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk yang memerlukan informasi;
7. Membantu tugas Kepala Bagian Humas dan Protokol sebagai juru bicar pemerintah Kota sesuai dengan petunjuk Walikota;
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang protokol dan dokumentasi;
2. Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan bidang protokol dan dokumentasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Mengatur persiapan rapat, pertemuan /resepsi, upacara dan kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler;
4. Menyiapkan upacara dan mengatur keprotokolannya serta melakukan kerja sama dengan instansi lain di bidang keprotokolan persiapan pelantikan;
5. Melaksanakan inventarisasi dan memelihara hasil dokumentasi dan audio visual;
6. Melaksanakan usaha-usaha untuk peningkatan hasil dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
7. Menghimpun dan mendokumentasikan naskah pidato Walikota;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama SKPD

Bagian Humas dan Protokol dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik sebagaimana agenda RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2015 - 2019.

Sebagai bagian dari lembaga Pemerintah Kota Mojokerto, Bagian Humas dan Protokol turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program-program

pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto, membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Strategi Pembangunan tahun 2015-2019 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi Walikota Mojokerto yaitu TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL.

Bagian Humas dan Protokol mempunyai peranan penting dalam menjaga mekanisme komunikasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan stake holder lain agar tetap terjaga, sehingga kebijakan dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran.

Perkembangan reformasi di segala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip good governance ini juga akan menuntut adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik ini akan mampu menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, lebih terjaminnya aliran arus aspirasi dan tersampainya kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat. Arus komunikasi dua arah ini membawa konsekuensi pada perlunya keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi, hal ini berbeda dengan masa lalu dimana arus informasi lebih cenderung searah, yaitu kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas, masyarakat hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan Demokrasi dengan bentuk pemilihan kepala pemerintahan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat juga membawa konsekuensi pada semakin tingginya tanggung jawab kepala daerah yang dalam hal ini adalah Walikota, terhadap tuntutan masyarakat, makin kritisnya masyarakat terhadap visi, misi dan program pembangunan dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perlunya komunikasi yang intensif dan aktif dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat

untuk menjaga konsistensi kebijakan, program pembangunan, efektifitas dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komunikasi yang baik juga akan lebih meningkatkan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, karena seringkali perkembangan dan dinamika masyarakat berkembang sangat pesat, sementara itu di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang mempunyai kurun waktu 25 tahun, dan kebijakan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu komunikasi yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dari hasil komunikasi ini dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran.

Bentuk komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat luas dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik langsung maupun melalui media lain, yaitu media masa. Besarnya peranan dan pengaruh media masa, apalagi dijamin teknologi informasi seperti sekarang ini, maka pemerintah harus dapat memanfaatkan peranan media masa ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi mitra yang efektif terhadap kegiatan komunikasi dua arah dan pencitraan pemerintah daerah.

Sebagai lembaga pelayanan publik, Bagian Humas dan Protokol juga dapat menjadi media komunikasi, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa komunikasi yang baik akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat luas.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Bagian Humas dan Protokol mengemban tugas yang penting untuk meningkatkan dan menjaga sistem komunikasi dan informasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan stake holders lainnya tetap baik, meningkatkan citra yang baik lembaga Pemerintah Kota Mojokerto kepada masyarakat, terutama dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu Bagian Humas dan Protokol juga bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan Protokol resmi Pimpinan Pemerintahan Kota Mojokerto, khususnya Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan VVIP/Tamu lainnya yang datang menjadi tamu Pemerintah Kota Mojokerto.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 VISI dan MISI

VISI :

Agar sebuah organisasi mempunyai arah yang jelas, maka untuk mencapai tujuan yang diinginkan telah ditetapkan VISI dari Bagian Humas dan Protokol adalah :

“Terwujudnya layanan informasi, dokumentasi dan protokoler yang tanggap, tertib dan berkualitas”.

MISI :

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto mempunyai MISI sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan informasi yang berkualitas ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokoleran dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah ;

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk melaksanakan misi tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- 1 Misi : Mewujudkan pelayanan informasi yang berkualitas
 Tujuan : Tersedianya data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Mojokerto.
 Sasaran : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui media massa

- 2 Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokoleran dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah
 Tujuan : Terselenggaranya pelaksanaan suatu acara / upacara yang tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 Sasaran : Meingkatkan kualitas pelayanan protokol dan dokumentasi.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Tabel 2.1
PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
TAHUN 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	.6
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui media massa	Persentase Kegiatan Pemerintah Kota yang dipublikasikan	1 judul film	Pembuatan Video Profile Kota Mojokerto	Rp 5.846.000,-
			1 unit	Pengadaan Videotron	Rp. 902.931.900,-
			500 ekspl	Pembuatan Buku Kiprah	Rp 193.510.000,-
			70 media massa	Kerjasama dengan media massa	Rp 3.698.550.000,-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokoleran dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah ;	Persentase Kepuasan pejabat daerah dan SKPD terhadap pelayanan protokol.	1 kali kegiatan	1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Rp 342.028.000,-
			100 orang peserta	2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Rp 74.120.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran hasil kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Bagian Humas dan Protokol Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerja Bagian Humas dan Protokol 2015 berdasarkan hasil pengukurannya disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
TAHUN 2015

NO	SASARAN	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui media massa	Persentase Kegiatan Pemerintah Kota yang dipublikasikan	70 media	70 media	100 %
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokoleran dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah ;	Persentase Kepuasan pejabat dan SKPD terhadap pelayanan protokol.	90 %	90 %	100 %

Adapun jumlah media yang menjadi target kinerja pada program dan kegiatan penyebaran informasi melalui mass media, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No.	Nama Media	Media cetak	Media elektronik
1	Duta Masyarakat	✓	
2	Indosiar		✓
3	KGB	✓	
4	SCTV		✓
5	BBS TV		✓
6	AN TV		✓
7	RCTI		✓
8	JTV		✓
9	Satu Jurnal		✓
10	Sukses	✓	
11	El Shinta		✓
12	TV 9		✓
13	Maja FM		✓
14	Surya	✓	
15	Bhirawa	✓	
16	Amunisi	✓	
17	Bidik Nasional	✓	
18	Surabaya Post.com		✓
19	Harian Bangsa	✓	
20	Fakta	✓	
21	Demokrasi	✓	
22	TV One		✓
23	Radar Bangsa	✓	
24	Radar Mojokerto	✓	
25	Kompas TV		✓
26	News Patroli	✓	
27	Jatim Pos	✓	
28	Hapra Indonesia	✓	
29	Detektif	✓	
30	Surabaya Pagi	✓	
31	Investigasi	✓	
32	Palapa	✓	
33	Realita Masyarakat	✓	

34	Opsi	✓	
35	Teropong	✓	
36	Reportase	✓	
37	Koran Sindo	✓	
38	Memorandum	✓	
39	Surya Bangsa	✓	
40	R-FM		✓
41	Pojok Kiri	✓	
42	Mojokerto Pos	✓	
43	Global News	✓	
44	Metro TV		✓
45	Warta Pos	✓	
46	Radar Nusantara	✓	
47	Koran Dor	✓	
48.	Jaya Pos	✓	
49.	Berita Metro	✓	
50.	Suara Media Nasional	✓	
51.	Cahaya Baru	✓	
52.	Merdeka News	✓	
53.	Metro Jatim	✓	
54.	Radar Indonesia	✓	
55.	Jagad Pos	✓	
56.	Detik.com		✓
57.	Majalah Global	✓	
58.	Net TV		✓
59.	Warta Hukum	✓	
60.	Metro Surya	✓	
61.	Optimis	✓	
62.	Pena Rakyat Indonesia	✓	
63.	Forum Indonesia	✓	
64.	Radar Pos	✓	
65.	Wantara	✓	
66.	Realita.Co		✓
67.	Berita Jatim.com		✓
68.	Suara Harian Pagi	✓	

69.	Harian Buana.com		✓
70.	Surya Indonesia	✓	

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator sasaran lainnya yang mendukung capaian kinerja sasaran dan berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Lebih lanjut perbandingan antara capaian selama tahun 2014, dan 2015 dibanding target disajikan dalam tabel 3.2

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator Bagian Humas dan Protokol secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Kinerja Bagian Humas dan Protokol
Tahun 2014, 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui media massa	Persentase Kegiatan Pemerintah Kota yang dipublikasikan	55 media	55 Media	100 %	70 media	70 media	100 %
		500 Buku	500 Buku	100 %	500 Buku	500 Buku	100 %
		0	0	0	1 judul film	1 judul Film	100 %
		0	0	0	1 unit videotron	1 unit videotron	100 %
Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokoleran dan pendokumentasian	Persentase Kepuasan pejabat dan SKPD	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %

kegiatan Pemerintah Daerah ;	terhadap pelayanan protokol.						
------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, dapat diuraikan analisa capaian kinerja per indikator sebagai berikut :

1. Persentase Kegiatan Pemerintah Kota yang dipublikasikan

Indikator capaian yang berupa Jumlah penyiaran pers release melalui media cetak dan elektronik, Jumlah iklan/advetorial melalui media cetak dan elektronik, serta jumlah cetak dan penggandaan buku kiprah Walikota tahun ke – 2 pada tahun anggaran 2015 ini dapat berjalan dengan baik sesuai target yang diharapkan. Pelaksanaan indikator ini adalah dalam bentuk kerjasama dengan media cetak dan elektronik sebanyak 70 mass media yang tercover pada sub bagian pemberitaan Bagian Humas dan Protokol.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, prosentase capaian kinerja dari program kegiatan ini pada tahun 2014 adalah sama yaitu sebesar 100%., tetapi pada tahun 2014 hanya ada 55 media massa yang tercover. Jadi ada kenaikan 16 media massa yang tercover pada tahun 2015 ini. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesarRp. 4.330.957.000,- atau 99,11% dari anggaran Rp. 4.369.920.000,-.

2. Persentase Kepuasan pejabat dan SKPD terhadap pelayanan protokol.

Pada indikator capaian ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh bagian Humas dan Protokol terhadap kepuasan pelayanan Protokoler dengan 100 responden yang terdiri dari Pejabat Daerah dan SKPD. Selain survey, yang menjadi tolok ukur dari capaian kinerja program kegiatan protokoler dan dokumentasi adalah animo peserta yang hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi undang-undang keprotokolan dan workshop jurnalistik, fotografi, dan pameran foto dengan peserta dari unsur pelajar, mahasiswa, wartawan, PNS, dan masyarakat umum. Capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 %. Hal ini disebabkan karena kegiatan sosialisasi undang-undang keprotokolan ini sangat diminati oleh peserta, karena disamping materi yang disampaikan ini sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh masing-masing SKPD. Dari semua undangan yang dikirimkan kepada masing-masing SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Mojokerto mendapat respon yang sangat baik, sehingga jumlah peserta yang ditargetkan akan hadir dalam kegiatan sosialisasi ini adalah 90 % tetapi ternyata hadir 100 % dari total

undangan yang dikirim. Kondisi ini sama dengan keadaan pada Tahun Anggaran 2014. Dari evaluasi peserta pada akhir kegiatan semua memberi nilai yang positif dan memberikan saran/masukan bahwa kegiatan sosialisasi ini perlu diadakan tiap tahun agar semakin banyak aparatur yang mengetahui dan memahami tentang undang-undang keprotokolan tersebut, sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dapat berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis dari pelaksanaan kegiatan undang-undang keprotokolan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan protokol dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto

Kegiatan untuk mencapai indikator ini menggunakan dana APBD sebesar Rp. 416.148.000,- atau 94,14 % dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 442.075.200,-.

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Bagian Humas dan Protokol dibiayai dari dana APBD.

Realisasi anggaran dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2015

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIA TAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui media massa	-Pembuatan Video Profile Kota Mojokerto	6.000.000,-	5.846.000,-	97,43 %
		-Pengadaan Videotron	960.761.500,-	902.931.900,-	93,98 %
		-Pembuatan Buku Kiprah	193.510.000,-	188.032.000,-	97,16 %
		- Kerjasama dengan mass media	4.369.920.000,-	4.330.957.000,-	99,10 %

2	Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokoleran dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah ;	-Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi -Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	346.645.200,-	342.028.000,-	98,68 %
			95.430.000,-	74.120.000,-	77.66 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dapat diuraikan tentang keberhasilan, permasalahan/ kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Secara Umum kegiatan dibagian Humas dan Protokol Sekretariat Kota Mojokerto telah dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam pelaksanaan maupun hasil (Outcome) ada yang belum tercapai 100%.

b. Permasalahan / Kendala.

Setelah diadakan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan / kendala yang dihadapi Bagian Humas dan Protokol, adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah personil pada Bagian Humas dan Protokol, sehingga terjadi perangkapan jabatan dan tanggung jawab pada masing-masing personil, hal ini menyebabkan kurang cermat dalam penyusunan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Masih banyaknya bermunculan media massa baru yang mengadakan peliputan di wilayah Kota Mojokerto yang minta untuk diakomodir ;
3. Masih banyaknya orang-orang yang mengaku wartawan atau LSM yang perlu mendapatkan penanganan tersendiri.

c. Strategi pemecahan masalah

1. Mengoptimalkan personil yang ada untuk melaksanakan program kegiatan.
2. Hendaknya dipikirkan untuk penunjukkan atau pembentukan Sub Bag Baru yang khusus menangani Sungram.
3. Menginventarisir media massa baik cetak maupun elektronik yang eksis mengadakan peliputan di wilayah Kota Mojokerto, diusahakan untuk diakomodir pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan laporan pada tahun mendatang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

VISI : Terwujudnya layanan informasi, dokumentasi dan protokoler yang tanggap, tertib dan berkualitas

MISI – 1 : 1. Mewujudkan pelayanan informasi yang berkualitas ;

TUJUAN - 1 : Tersedianya data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2014			TAHUN 2015			Capaian 2014 dibandingkan Capaian 2015	Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)	(8)=(7/4)	(9)
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Mojokerto								
1.1	Jumlah penyiaran pers release melalui media cetak dan elektronik	55 media	55 media	100%	70 media	70 media	100%	100.00%	
1.2	Jumlah iklan / advetorial melalui media cetak dan elektronik	55 media	55 media	100%	70 media	70 media	100%	100.00%	
1.3	Jumlah cetak dan penggandaan buku kiprah Walikota	500 ekspl	500 ekspl	100%	500 ekspl	500 ekspl	100%	100.00%	
1.4	Jumlah Video Profil Kota Mojokerto	0	0	0	1 judul film	1 judul film	100 %	100 %	
1.5	Jumlah Sarana Penyiaran (Videotron)	0	0	0	1 unit	1 unit	100 %	100 %	

MISI – 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokoleran dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah

TUJUAN - 2 : Terselenggaranya pelaksanaan suatu acara / upacara yang tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2014			TAHUN 2015			Capaian 2014 dibandingkan Capaian 2015	Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)	(8)=(7/4)	(9)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan protokol dan data dokumentasi								
2.1	Persentasen kepuasan Pejabat Daerah dan SKPD terhadap layanan Protokol dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %	100%	
2.2	Persentase Aparatur yang mengikuti kegiatan sosialisasi undang-undang keprotokolan, workshop jurnalistik dan fotografi	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %	100%	

**PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
BAGIAN UMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Indikator Capaian		Program
				2014	2015	2014	2015	2014	2015	
1	2	3	4	8	9	13	14	18=13/8	19=14/9	20
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui media massa	Persentase Kegiatan Pemerintah Kota yang dipublikasikan	%	90	90	100	100	100	100	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
2	Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokoleran dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah ;	Persentasesn kepuasan Pejabat Daerah dan SKPD terhadap layanan Protokol dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto	%	90	90	100	100	100	100	